BAB III

HAK GUGAT PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA

3.1. Pengertian Hak Gugat

3.1.1. Menurut Doktrin

Hak Gugat adalah Hak warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik termasuk kepentingan lingkungan yang mengajukan gugatan dipengadilan guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi (Efendi, Widodo, & Luftianingsih, 2016).

3.1.2. Menurut UU

Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa: “Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”.

Hak gugat pemerintah tersebut baru dapat diberlakukan apabila kerugian akibat perusakan lingkungan oleh badan usaha telah mengganggu hak milik publik maupun hak milik negara. Sehingga pemerintah harus dapat mengambil keputusan sesegera mungkin dalam menilai jenis kerusakan atau pencemaran lingkungan yang terjadi di tengah masyarakat.

3.2. Pengertian Pemerintah Daerah

3.2.1. Menurut Ahli

Menurut Gomme “Pemerintah adalah bagian dari keseluruhan pemerintahan suatu negara atau bagian negara yang dikelola oleh otoritas yang ada di bawah otoritas negara, oleh orang-orang yang berkualifikasi, atau memiliki properti di daerah tertentu, yang dimiliki daerah setempat” (Gomme, 1987).

Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah negara dan yang menerima pelimpahan urusan untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterahkan masyarakat (Setiawan, 2018).

3.2.2. Menurut UU

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tertulis bahwa pengertian “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah merupakan pemerintahan yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola baik tata ruang suatu daerah maupun tata kelola administrasi pemerintahan suatu daerah tertentu. Itu berarti pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas

segala bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi di dalam wilayah pemerintahannya terlebih yang menyangkut perizinan pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut, sehingga pemerintah daerah berhak untuk melakukan pencegahan perusakan lingkungan oleh badan usaha dengan cara menolak menerbitkan izin pengelolaan sumber daya alam didalam wilayah pemerintahannya.

3.3. Kedudukan Hak Gugat Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Peranan Hukum Administrasi Negara Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan bahwa penegakan hukum lingkungan dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan; yang dapat dilakukan secara preventif dan represif. Negara yang menganut konsep Negara hukum kesejahteraan maka Indonesia wajib menerapkan system perlindungan hukum bagi rakyat. Dan perlindungan hukum tersebut dapat dijalankan dalam bidang perdata dan bidang publik. Berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan (Amir, 2013, hal. 72). Kedudukan dan fungsi hukum administrasi Negara yang demikian vital terhadap penegakan hukum lingkungan yang diatur di dalam UU-PPLH dapat difahami apabila melihat fungsi Negara/pemerintah sebagai lembaga publik yang berada dalam

system Negara hukum kesejahteraan (welfarestate) dimana Negara / pemerintah berke-wajiban berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat (Amir, 2013, hal. 71).

Cakupan penegakan hukum tersebut dapat ditemukan di dalam seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Substansi penegakan hukum ini pun dirasa sesuai dengan konsep pembedaan hukum lingkungan yang didasarkan pada karakteristik substansinya yakni, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan pidana, hukum lingkungan internasional, hukum lingkungan regional dan hukum lingkungan administrasi. Masing-masing pembedaan tersebut mengandung azas-azas hukum yang berbeda. Ditinjau dari aspek keperdataan (*privaatrechtelijk milieurecht*), maka substansi hukum yang terkait adalah menyangkut dengan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada hak milik individu sehingga melahirkan pertanggung jawaban (*liability*) hukum atas perbuatan tersebut dalam bentuk ganti rugi dan biaya pemulihan serta cara penyelesaiannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”. Di dalam UU-PPLH pengaturan tentang tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah

diatur pada Bab IX Pasal 63 dan Pasal 64. Sedangkan wewenang Pemerintah Kota dan kabupaten diatur dalam Pasal 63 ayat (3) UUPPLH. Tugas dan wewenang Pemerintah tersebut dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri seperti yang dinyatakan dalam Penjelasan Umum bahwa: “Undang-Undang ini (maksudnya adalah UUPPLH) memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui undang-undang ini pula pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Berdasarkan ketentuan tugas dan wewenang pemerintah tersebut dapat dikelompokkan sesuai dengan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Sementara organisasi yang bertanggungjawab berdasarkan UU- PPLH di tingkat pusat adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini seyogyanya tidak saja Menteri Negara Lingkungan Hidup, namun juga menteri-menteri bidang lain yang mempunyai keterkaitan bidang dengan lingkungan/sumber daya alam seperti Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Energi dan Sumber daya mineral,

Menteri Perikanan dan Kelautan termasuk juga Kepala Badan Pertanahan Nasional (Amir, 2013).

Berdasarkan dari uraian diatas sistem penegakkan hukum lingkungan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakkan hukum, terutama penegakkan dalam hukum administrasi harus tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pengrusakan terhadap lingkungan. Sehingga dalam melakukan usaha atau mengeksploitasi alam (lingkungan) tidak memberikan kerugian bagi masyarakat yang ada disekitarnya serta hukuman tersebut dapat memberikan efek jera kepada siapa saja yang melakukan eksploitasi lingkungan.

Guna mengatasi permasalahan penegakkan hukum lingkungan di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan UUPPLH No 32 Tahun 2009. Diharapkan dengan terbitnya peraturan tersebut permasalahan tentang problematika penegakkan hukum lingkungan di Indonesia dapat teratasi dengan baik dan dapat memberikan kepastian hukum bagi siapa saja yang melakukan pengrusakan atau bagi mereka yang merasa dirugikan.

3.4. Bentuk Hak Gugat Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Atas Kerusakan Lingkungan

Sebagaimana telah terjadi banyak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh badan usaha yang dengan nyata melakukan kegiatan usahanya yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan sehingga

merugikan banyak pihak dalam menjalani kehidupan, baik kerugian secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari izin tersebut. Dalam praktiknya, menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin bersifat *discretionary power* atau berupa kewenangan bebas dalam arti kepada pemerintah memberikan kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri (Adhani, 2015). Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UUPPLH pemerintah daerah berwenang untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap badan usaha dan atau kegiatan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian baik bagi lingkungan hidup itu sendiri maupun negara. Berdasarkan atas dasar hukum tersebut maka sesungguhnya pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di dalam wilayah pemerintahannya sebelum kerusakan lingkungan tersebut terjadi, khususnya bagi badan usaha yang terindikasi dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam proses berjalannya badan usaha tersebut baik untuk saat ini maupun dimasa yang akan datang. Tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dan atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.